

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DAMPAK PEMBANGUNAN WADUK SERBAGUNA DI ROKAN
KIRI KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN
TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

SYAHRON LUBIS

11427100719

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1441 H/2019 M

**DAMPAK PEMBANGUNAN WADUK SERBAGUNA DI ROKAN
KIRI KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN
TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM**

SKRIPSI

*Skripsi ini diajukan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)*



Oleh:

SYAHRON LUBIS

11427100719

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1441 H/2019 M

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

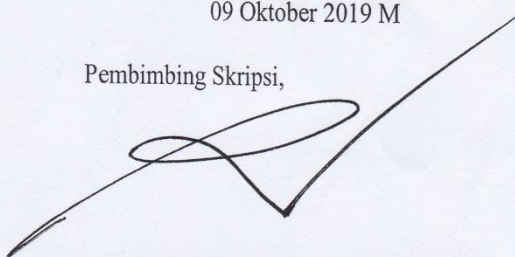
Skripsi ini dengan judul *Dampak Pembangunan Waduk Serbaguna Di Rokan Kiri Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, yang ditulis oleh :

Nama : **SYAHRON LUBIS**
NIM : 11427100719
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk dijadikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Safar 1441 H
09 Oktober 2019 M

Pembimbing Skripsi,



PERI PIRMANSYAH SH, MH
NIP. 13021720

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, "**Dampak Pembangunan Waduk Serbaguna Di Rokan Kiri Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum**" yang ditulis oleh :

Nama : SYAHRON LUBIS
NIM : 11427100719
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 28 Oktober 2019
Waktu : Jam, 13.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasayah Fakultas Syariah dan hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

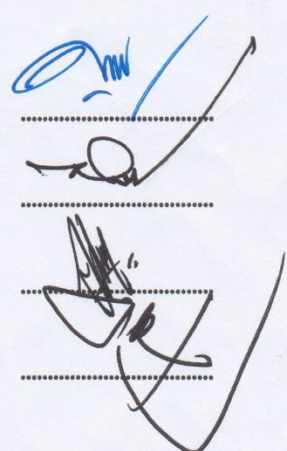
Pekanbaru, 28 Oktober 2019
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, MA.

Sekretaris
Ahmad Fauzi, SHi., MA.

Penguji 1
Lysa Angrayni, SH., MH.

Penguji 2
H. Mhd. Kastulani, SH., MH.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

ABSTRAK

Kripsi ini berjudul: *Dampak Pembangunan Waduk Serbaguna Di Rokan Kiri Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.*

Pembangunan sebuah proyek pasti memberikan dampak terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitarnya, dampak tersebut dapat berupa hal yang positif bahkan juga negatif, Sasaran utama pembangunan adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Maka salah satu strategi yang di lakukan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat adalah melaksanakan pembangunan. Kabupaten Rokan Hulu membangun sebuah proyek raksasa yaitu proyek pembangunan Waduk Rokan, pembangunan waduk tersebut tepatnya berada di antara empat Desa. Desa Cipang Kiri Hulu, Desa Cipang Kiri Hilir, Desa Tibawan, Desa Cipang Kanan. Kecamatan Rokan IV Koto. Kabupaten Rokan Hulu. Pembangunan waduk tersebut berdampak bagi masyarakat disekitarnya, terutama yang akan menjadi masyarakat calon genangan.

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana dampak pembangunan waduk serbaguna di rokan kiri kabupaten rokan hulu berdasarkan peraturan presiden nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan bagaimana pembangunan waduk serbaguna di rokan kiri kabupaten rokan hulu menurut peraturan presiden nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Metode penelitian ini yuridis empiris (sosiologis) dengan menggunakan pendekatan kualitatif tentang dampak pembangunan waduk serbaguna di rokan kiri kabupaten rokan hulu berdasarkan peraturan presiden nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Hasil penelitian dampak pembangunan waduk serbaguna di rokan kiri kabupaten rokan hulu berdasarkan peraturan presiden nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, lebih berdampak kenegatif daripada kepositif. Sehingga masyarakat menuntut agar pembangunan waduk rokan kiri agar segera di hentikan dan tidak dilanjutkan kembali. Sedangkan pembanguan waduk serbaguna di rokan kiri kabupaten rokan hulu menurut peraturan presiden nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dari mulai tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil, Proses Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, tidak melalui undang undang dan peraturan presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim Ws. Wb.

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebeasar-besarnya kepada :

1. Keluarga tecinta, Ibunda (Almh Nur'aini) dan Ayahanda (Alm. Udin Sulaiman) serta Abang Syafril Lubis, Abang Syahrizal Lubis, Abang Sohar Lubis, Abang Shahnan Lubis, Kakak Sitiawan Lubis, Abang Safaruddin Lubis, yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih untuk semuanya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag Rektor Uin Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Uin Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Bapak Firdaus, SH. MH dan staf jurusan ilmu hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Peri Pirmansyah, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Hertina, M.Pd. selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
8. Sahabat Aktivist UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian Skripsi.
9. Sahabat, Manunggal Squad yang sangat membantu penulis menemukan solusi dalam menyelesaikan tugas akhir penulis.
10. Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syariah, Ushuluddin & Fapertapet (SUPER) UIN SUSKA yang memotivasi penulis untuk tetap semangat dalam menghadapi kendala dalam penelitian dan penulisan tugas akhir.
11. Kepada semua sahabat-sahabat Ilmu Hukum angkatan 2014, terkhusus lokal IH 6 dan kakak-kakak senior yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

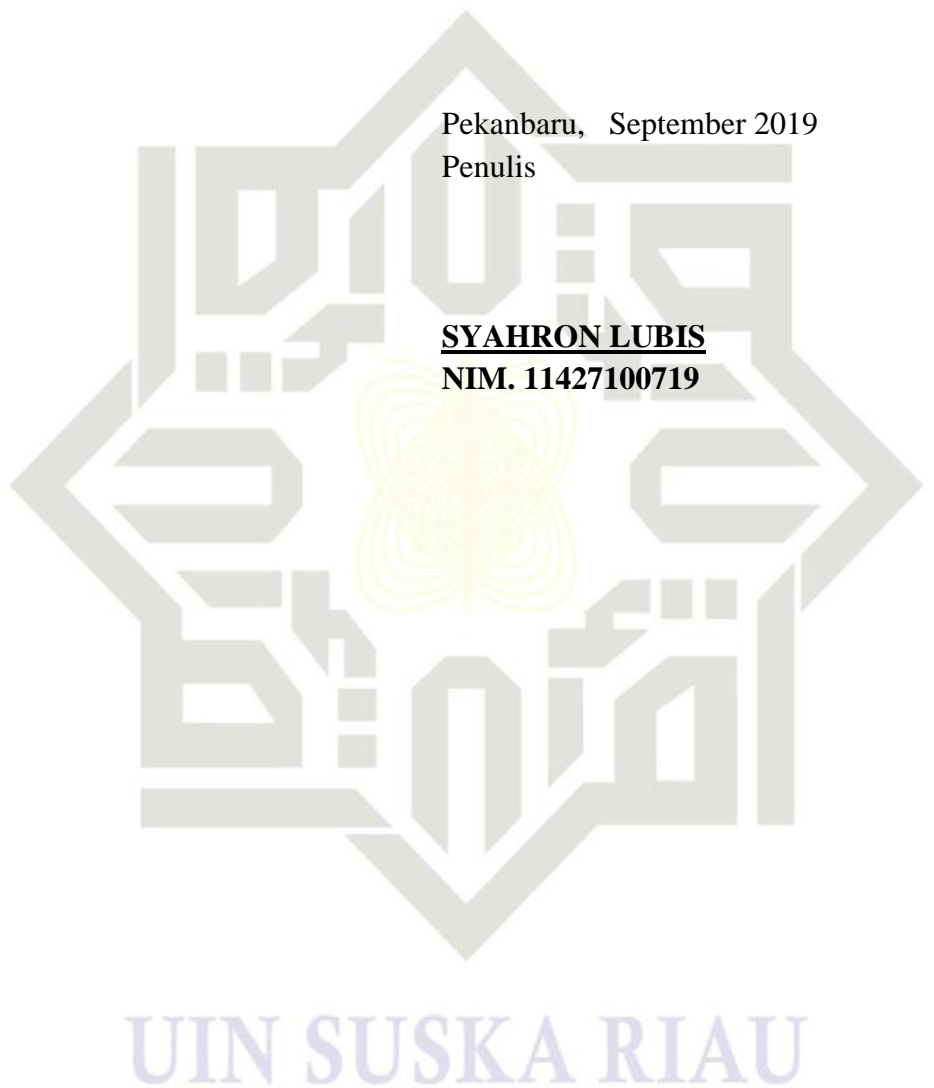
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, September 2019
Penulis

SYAHRON LUBIS
NIM. 11427100719



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Kabupaten Rokan Hulu	17
B. Letak Geografis Rokan Hulu	21
C. Letak Geografis Kecamatan Rokan IV Koto	23
D. Struktur Organisasi Kecamatan Rokan IV Koto	24
E. Visi Dan Misi Kecamatan Rokan IV Koto	25
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Teori Dampak.....	26
B. Pengertian Pembangunan	27
C. Pengertian Bendungan	30
D. Pengertian waduk	30
E. Jenis-Jenis Dan Manfaat Waduk	32
F. Dasar-Dasar Pengatur Waduk	36

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN

BAB V PENUTUP

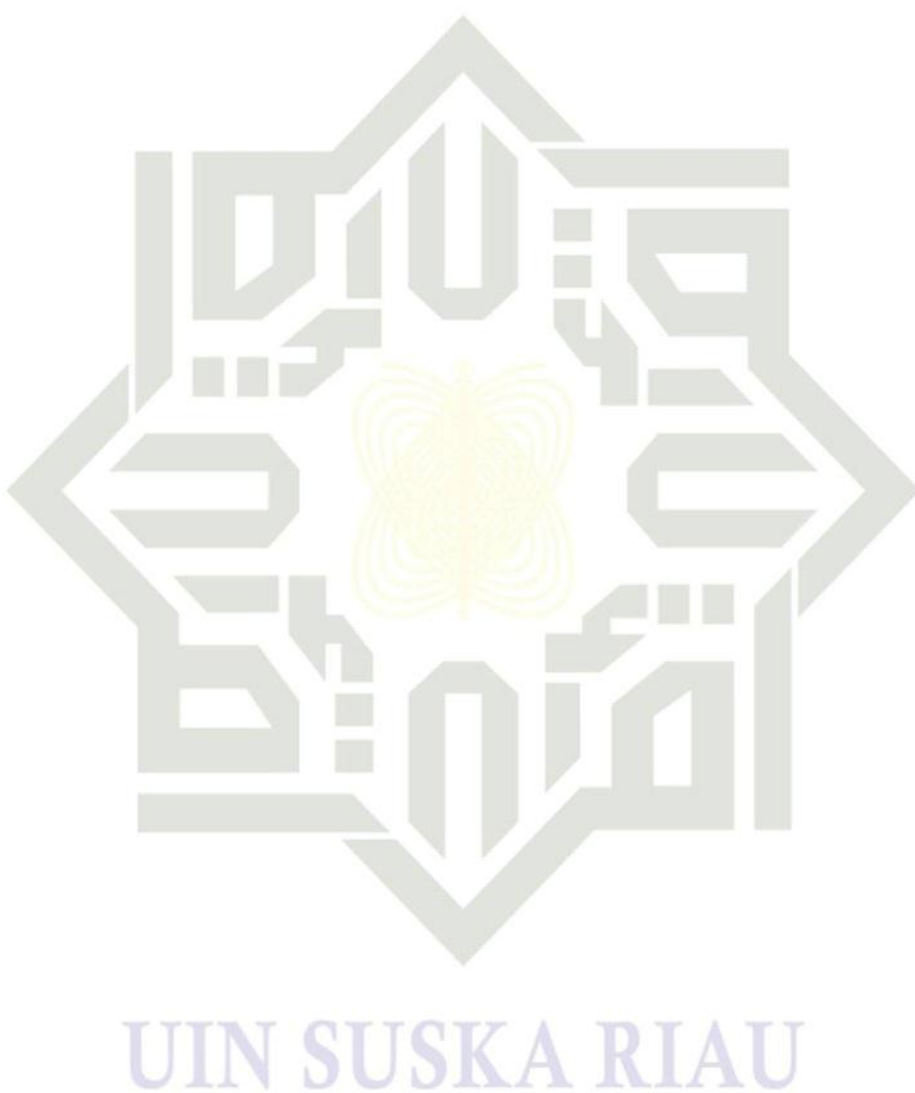
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
A. Dampak Pembangunan Waduk Serbaguna di Rokan Kiri Kabupaten Rokan Hulu Menurut Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.....	38
B. Bagaimana Pembangunan Waduk Serbaguna Di Rokan Kiri Kabupaten Rokan Hulu Menurut Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.....	46
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Populasi dan Sampel	12
-------------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

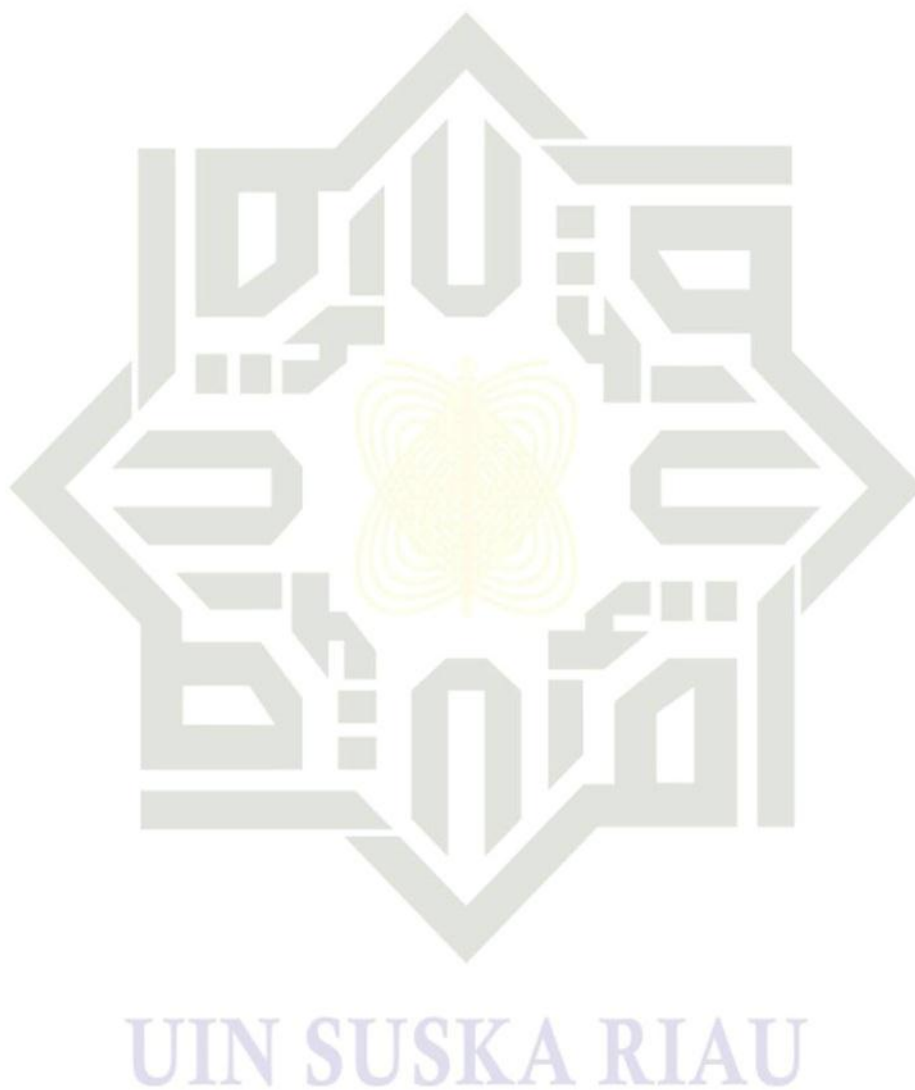
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu	24
------------	---	----



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah mempunyai peranan penting dalam hidup dan kehidupan masyarakat diantaranya sebagai prasarana dalam bidang perindustrian, perumahan, dan jalan. Tanah dapat dinilai sebagai benda tetap yang dapat digunakan sebagai tabungan masa depan. Selain itu, tanah merupakan tempat pemukiman dari sebagian besar umat manusia, di samping sebagai sumber penghidupan bagi manusia yang mencari nafkah melalui usaha tani dan perkebunan, yang akhirnya tanah juga yang dijadikan persemayaman terakhir bagi seseorang yang meninggal dunia.¹

Karenanya, tanah merupakan faktor pendukung utama kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi tanah tidak hanya terbatas pada kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga tempat tumbuh kembang sosial, politik, dan budaya seseorang maupun suatu komunitas masyarakat.² Dengan demikian, semakin tumbuh kembangnya masyarakat sosial, politik, dan budaya, maka semakin sempit pula tanah untuk berpijak.

Pada dasarnya setiap pembangunan pasti diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup atau kesejahteraan masyarakat, tetapi disamping itu setiap pembangunan juga pasti akan menghasilkan dampak positif dan negatif pada setiap tahapannya. Aktivitas pembangunan akan menghasilkan

¹ Abdurrahman, *Masalah Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, cet. ke-2, (Bandung: Alumni, 1983), h. 1

² Wianahyu Erwiningsih, "Hak Menguasai Negara atas Tanah", *Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Program Pascasarjana, 2009), h. 1

dampak pada manusia maupun lingkungannya. Dampak terhadap manusia yakni meningkat atau menurunnya kualitas hidup manusia, sedangkan dampak bagi lingkungan yakni meningkat atau menurunnya daya dukung alam yang akan mendukung kelangsungan hidup manusia.

Pembangunan waduk merupakan salah satu bentuk pelestarian atau konservasi terhadap sumber daya air, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 pasal 1 Tentang Bendungan, bahwa bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (*tailing*), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk³. Waduk itu sendiri adalah bendungan yang dibuat sengaja oleh manusia dengan maksud untuk menampung air yang nantinya dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup manusia.⁴

Berkaitan dengan Peraturan Presiden nomor 56 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berupa pembangunan untuk kepentingan umum, melibatkan kabupaten rokan hulu untuk pembangunan waduk di peruntukan guna memenuhi kebutuhan debit air guna irigasi, air bersih, dan sumber listrik.⁵

³ Peraturan Pemerintah Nomor 37 Pasal 1 Tahun 2010 tentang Bendungan

⁴ repository.upi.edu/14385/4/S_GEO_1001776_Chapter1.pdf

⁵ Peraturan Presiden nomor 56 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Letak pembangunan Waduk Rokan Hulu bertempat di 4 desa yaitu Tibawan, Cipang Kiri Hilir, Cipang Kiri Hulu, Cipang Kanan. Keempat desa tersebut berada di wilayah Kecamatan Rokan IV koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Pembangunan waduk rokan hulu ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten rokan hulu khususnya masyarakat yang berada di sekitar pembangunan waduk rokan hulu tersebut, pembangunan waduk rokan hulu bertujuan untuk:

1. Air baku ($0,12\text{m}^3/\text{detik}$)
2. Irigasi (Potensial : 6. 000 Ha)
3. PLTA (15 MW)
4. Reduksi banjir
5. Pengendalian erosi
6. Pariwisata

Genangan waduk rokan hulu akan membutuhkan lahan yang cukup luas, bangunan yang mencapai lebih kurang 19,4 Ha dimana untuk genangan 4000 Ha dan untuk akses jalan ke bendungan lebih kurang 5,46 Ha. Lahan yang akan di pergunakan untuk pembangunan waduk rokan hulu terdiri dari lahan milik masyarakat, lahan milik masyarakat terdiri dari sawah, pemukiman, ladang dan wisata alam yang ada disana.

Penggunaan lahan milik masyarakat sebagai area pembangunan waduk secara langsung akan memberikan suatu dampak bagi masyarakat itu sendiri, selain akan kehilangan tempat tinggalnya mereka juga akan kehilangan lapangan pekerjaannya, karena sebagian besar lahan yang akan di gunakan dalam pembangunan waduk rokan hulu ini adalah lahan yang di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gunakan oleh masyarakat untuk mencari nafkah, seperti lahan pertanian, perkebunan, sehingga bagi masyarakat yang bermata pencaharian di sektor pertanian dan perkebunan harus bersiap diri dengan kemungkinan beralih mata pencarian ke sektor lain. Tidak sedikit masyarakat yang akan terkena dampak langsung dari pembangunan waduk rokan hulu ini, dari keempat desa yang di gangggu setidaknya ada 15.000 jiwa penduduk yang akan terkena dampak langsung dari pembangunan waduk rokan hulu ini.

Suatu proses pembangunan diharapkan dapat berdampak positif bagi masyarakat, karena Negara Indonesia mempunyai cita-cita mulia dalam melaksanakan konsep berbangsa dan bernegara, dimana setiap pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkannya sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial. Negara indonesia secara normatif memiliki tujuan yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial.

Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945, pemerintah perlu melaksanakan pembangunan, namun pemerintah juga harus menjadikan Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) sebagai pedoman didalam melaksanakan pembangunan, pasal tersebut menyatakan bahwa, “ Bumi, Air, dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.⁶

⁶ Pasal 33 ayat 3 Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam penjelasan disebutkan bahwa “ Hak menguasai oleh Negara” dimaksudkan untuk mengatur mengenai dasar sistem perekonomian dan kegiatan perekonomian di negara Indonesia namun hal tersebut tidak terlepas dari upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Atas dasar itu, tujuan hak menguasai oleh negara atas sumber daya alam khususnya tanah adalah keadilan sosial dan untuk kemakmuran rakyat. Kedua aspek tersebut tidak dapat dipisahkan karena kedua-duanya merupakan satu kesatuan sistematis. Hak menguasai negara adalah instrumen yang tujuannya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Pasal 10 point c Undang undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum disebutkan bahwa Waduk, Bendungan, Bendung, Irigasi, Saluran Air Minum, Saluran Pembuangan Air dan Sanitasi dan pembangunan pengairan lainnya adalah “Pembangunan untuk Kepentingan Umum”⁷

Adapun yang di maksud dengan “pembangunan untuk kepentingan umum” yang harus di laksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sebagaimana tertulis di dalam Pasal 1 nomor 6 menyebutkan bahwa maksud kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁸

⁷ Pasal 10 point c Undang undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

⁸ Pasal 1 nomor 6 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

Namun peraturan presiden nomor 56 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional menyebutkan bahwa Pembangunan waduk Rokan Kiri merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang di peruntukan guna memenuhi kebutuhan debit air guna irigasi, air bersih dan sumber listrik.

Ternyata rencana pembangunan proyek tersebut di tolak secara keras oleh seluruh masyarakat Cipang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, dari realita tersebut terlihat bahwa antara keinginan pemerintah untuk membangun Waduk Serbaguna Rokan Kiri dengan masyarakat setempat mengalami perbedaan bahkan bisa disebut sangat bertentangan.

*Karena masyarakat tidak pernah dapat ganti rugi,*⁹ sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 disebutkan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.¹⁰ Bahkan masyarakat tidak pernah di ajak musyawarah untuk menetapkan besarnya ganti kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 37 Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 baik ia dalam tahap persiapan maupun dalam tahap pelaksanaan penyelenggaraan pengadaan tanah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 2 tahun 2012.

⁹ Azwir Abbas, Kepala Desa Cipang Kiri Hilir, *Wawancara*, Cipang Kiri Hilir, 27 Maret 2019

¹⁰ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

Disamping itu juga masyarakat berpendapat pembangunan waduk Rokan Kiri akan menenggelamkan Desa Cipang Kiri Hilir, Desa Cipang Kiri Hulu, Desa Cipang Kanan dan Desa Tibawan, dan membuat penduduknya tergesus dari kehidupan mereka. Pembangunan waduk ini menimbulkan potensi hilangnya sumber penghidupan bagi 15.000 jiwa di empat desa yang luasannya mencapai 6.000 hektar lahan yang didalamnya terdapat kawasan pemukiman dan menghilangkan potensi alam diantaranya Goa Kelambu Kuning, Puncak Vila Berkurung Embun. Bahkan pembangunan waduk itu hanya untuk kepentingan sekelompok orang saja. Kebutuhan listrik, air bersih dan irigasi di Propinsi Riau hari ini sudah cukup tersedia bahkan meraka menyebutkan Ada indikasi kebutuhan air bersih, irigasi dan sumber listrik ini nantinya diperuntukkan kepada perusahaan industri perkebunan skala besar.¹¹

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul: **Dampak Pembangunan Waduk Serbaguna Di Rokan Kiri Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas serta titik tolak masalah yang telah ada maka perlu kiranya membatasi

¹¹ [http: www.bbc.com](http://www.bbc.com) .Ribuan Warga Tolak Pembangunan Waduk Rokan Kiri Riau, Diakses Tanggal 06 Agustus 2018

masalah yang diteliti agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalah yang diteliti yaitu dampak pembangunan waduk serbaguna di Rokan Kiri Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembangunan waduk serbaguna menurut Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ?
2. Bagaimana dampak pembangunan waduk serbaguna di Rokan Kiri Kabupaten Rokan Hulu Menurut Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pembangunan waduk serbaguna di Rokan Kiri Kabupaten Rokan Hulu menurut Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- b. Untuk mengetahui dampak pembangunan waduk serbaguna di Rokan Kiri Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk meraih Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai dampak dan pembangunan waduk serbaguna Rokan Kiri Kabupaten Hulu Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- c. Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan menambah minat pembaca dalam memperkaya ilmu pengetahuan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan segala permasalahan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹²

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum sosiologi memandang hukum secara fenomena sosial dengan pendekatan struktural.¹³ Adapun jenis penelitian ini adalah

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 18.

¹³ Amiruddin, Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), h. 167.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian terhadap pengaturan pembangunan waduk serba guna menurut Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan survey ke lapangan dengan cara pengumpulan data dan fakta dalam penelitian ini dengan melakukan observasi dan wawancara langsung kepada narasumber dengan pendekatan efektifitas dan dampak kebijakan pemerintah daerah terhadap pembukaan jalan tanpa ganti kerugian tanah masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Alasan dipilihnya di kecamatan Rokan IV Koto penulis melihat adanya kejanggalan kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan waduk serbaguna yang mengambil tanah untuk pembangunan waduk serbaguna tanpa ganti kerugian tanah masyarakat dan tidak melakukan prosedur hukum mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil dalam pengadaan tanah dan tidak mengkaji dampak positif dan negative terhadap bangunan waduk tersebut.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.¹⁴ atau Populasi merupakan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1983, h. 172

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sekumpulan obyek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan penelitian.¹⁵Populasi dalam penelitian ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu 1 orang, Badan wilayah sungai sumatera III 1 orang, Camat Rokan IV koto 1 orang, Kepala desa Cipang Raya 4 orang, Tokoh Adat Cipang Raya 4 orang, Masyarakat Cipang Raya 15.000 orang. Adapun total dari populasi dalam penelitian ini berjumlah 15.011 orang.

Adapun sampel yang yang peneliti ambil sebanyak 23 orang. Untuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu 1 orang, Badan wilayah sungai sumatera III 1 orang, Camat Rokan IV koto 1 orang, Kepala desa Cipang Raya 4 orang, Tokoh Adat Cipang Raya 4 orang, dan untuk Masyarakat Cipang Raya di ambil 12 orang untuk perwakilan masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik pengumpulan data dengan menggunakan purposive sampel yaitu teknik pengumpulan sumber informasi yang tersedia secara tepat di maksudkan untuk mengoptimalkan informasi dari target yang lebih spesifik, atau sesuai dengan kriteria yang di inginkan oleh peneliti, pengambilan sampel di dasarkan atas tujuam tertentu dengan pertimbangan seperti, focus penelitian, pertimbangan ilmiah, keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga sehingga tidak bisa mengambil sampel yang besar dan jauh.¹⁶.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, h.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2018),h.26.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentasi
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu	1	1	100%
2	Badan wilayah sungai sumatera III	1	1	100%
3	Camat Rokan IV koto	1	1	100%
4	Kepala desa Cipang Raya	4	4	100%
5	Tokoh Adat Cipang Raya	4	4	100%
6	Masyarakat Cipang Raya	15.000	12	0,08%
Jumlah		15.011	23	0,15%

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.¹⁷ Data yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

Data diperoleh dari responden dengan cara wawancara kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hulu, Kepala Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera III, Camat Rokan IV Koto, Kepala Desa dan Kepala Adat yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur

¹⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.¹⁸ Seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan bahan hukum dalam penelitian berupa berbagai literatur yang dikelompokkan ke dalam:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional.¹⁹

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, *leaflet*, brosur, dan berita internet.²⁰

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon dan lain-lain.²¹

c. Data Tersier

Data tersier, yaitu suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, jurnal dan internet dan lain sebagainya

¹⁸ *Ibid*, h.156

¹⁹ *Ibid.*, h. 157.

²⁰ *Ibid.*,

²¹ *Ibid.*, h. 158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi dilapangan sebenarnya.
- b. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan Masyarakat dan pengambil kebijakan lainnya.
- c. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti.

6. Metode Analisis Data

Analisa data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.²² dan Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu setelah data terkumpul, data-data tersebut diklarifikasikan kedalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut kemudian data tersebut dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga akhirnya akan diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Demi untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulisan ini di bagi dalam 5 (lima) bab yang semuanya itu merupakan

²² *Ibid*, h. 183.

satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, untuk lebih jelasnya yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Terdiri dari kondisi sejarah kabupaten Rokan Hulu, letak geografis rokan hulu, biografi dan letak geografis kecamatan rokan IV koto, struktur organisasi Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, visi dan misi kecamatan rokan IV koto.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini berisikan tentang teori dampak, teori pembangunan, pengertian waduk, pengertian bendungan, jenis-jenis dan manfaat waduk, dasar-dasar pengaturan waduk.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang, bagaimana pembangunan waduk serba guna di Rokan Kiri Kabupaten Rokan hulu Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan dampak pembangunan waduk serba guna di Rokan Kiri Kabupaten Rokan Hulu menurut Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

@Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



BAB V : PENUTUP

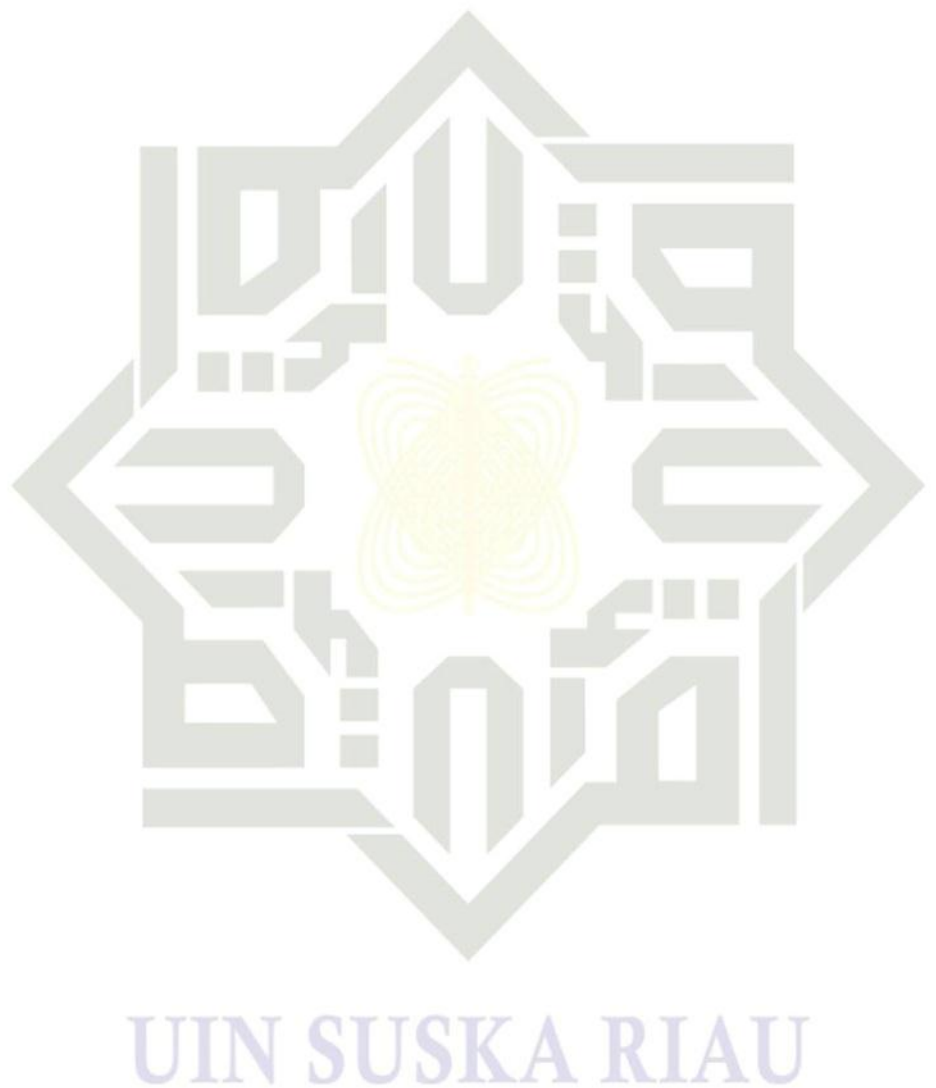
Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu merupakan sebuah kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Kampar yang berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan kepada UU Nomor 53 tahun 1999 dan UU No. 11 tahun 2003 tentang perubahan UU No 53 Tahun 1999 dan UU No 11 tahun 2003 tentang perubahan UU RI No 53 tahun 1999, yang diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No . 010/PUU-1/2004, tanggal 26 Agustus 2004.²³ Dahulu daerah Rokan Hulu disebut Rantau Rokan atau Luhak Rokan Hulu karena merupakan daerah perantauan orang-orang Minangkabau pada masa lalu (Rantau nan Tigo Jurai). Pada masa itu diistilahkan sebagai ‘Teratak Air Hitam’ yakni Rantau Timur Minang kabau di sekitar Kampar dan Kuantan sekarang.

Daerah-daerah tersebut meliputi daerah alur sungai menuju hilir dari sungai-sungai besar yang mengalir ke Pesisir Timur. Diantaranya adalah Sungai Rokan, Siak, Tapung, Kampar dan Indragiri (Kuantan), yang kini kesemuanya masuk di dalam Provinsi Riau. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Rokan Hulu menggunakan adat istiadat dan bahasa daerah yang termasuk varian Rumpun Budaya Minangkabau. Utamanya mirip dengan daerah Rao dan Pasaman di Provinsi Sumatera Barat.

²³<http://dprd-rohul.go.id/pages/sejarah-kabupaten-rokan-hulu>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di sekitar daerah perbatasan bagian Timur dan Tenggara, bermukim pula sedikit Suku Melayu yang memiliki adat istiadat dan bahasa daerah mirip dengan tetangganya di Rokan Hilir dan Bengkalis. Namun di sekitar Rokan Hulu sebelah Utara dan Barat Daya, ditemukan penduduk asli yang memiliki kedekatan sejarah dengan etnis Rumpun Batak di daerah Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara. Mereka telah mengalami proses Melayunisasi sejak berabad yang lampau dan tidak banyak meninggalkan jejak sejarah untuk ditelusuri. Mereka umumnya mengaku sebagai orang Melayu.

Selain itu juga banyak penduduk bersuku Jawa yang datang lewat program transmigrasi nasional sejak masa kemerdekaan maupun keturunan para perambah hutan asal Jawa yang masuk pada masa penjajahan lewat Sumatera Timur. Mereka tersebar di seluruh wilayah Rokan Hulu, terutama di sentra-sentra lokasi transmigrasi dan juga di areal perkebunan sebagai tenaga buruh. Juga banyak bermukim para pendatang asal Sumatera Utara bersuku Batak yang umumnya bekerja di sector jasa informal dan perkebunan.

Di daerah-daerah perniagaan ditemukan banyak penduduk pendatang bersuku Minang kabau asal Sumatera Barat yang umumnya bekerja sebagai pedagang. Selain itu juga didapati berbagai etnis Indonesia lainnya yang masuk kemudian sebagai pendatang. Pada umumnya mereka bekerja sebagai buruh pada sektor perkebunan.²⁴

Sejarah Kabupaten Rokan Hulu Zaman Penjajahan Belanda Sebelum kemerdekaan yakni pada masa penjajahan Belanda, wilayah Rokan Hulu terbagi atas dua daerah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Wilayah Rokan Kanan yang terdiri dari Kerajaan Tambusai, Kerajaan Rambah dan Kerajaan Kepenuhan.
2. Wilayah Rokan Kiri yang terdiri dari Kerajaan Rokan IV Koto, Kerajaan Kunto Darussalam serta beberapa kampung dari Kerajaan Siak (Kewalian negeri Tandun dan kewalian Kabun)

Kerajaan-kerajaan di atas sekarang dikenal dengan sebutan Lima Lukah. Kerajaan-kerajaan tersebut dikendalikan oleh Kerapatan Ninik Mamak, sementara untuk penyelenggaraan pemerintahan di kampung-kampung diselenggarakan oleh Penghulu Adat. Sering dikenal dengan istilah ‘Raja itu dikurung dan dikandangkan oleh Ninik Mamak’. Pada tahun 1905, kerajaan-kerajaan di atas mengikat perjanjian dengan pihak Belanda. Diakuiilah berdirinya kerajaan-kerajaan tersebut sebagai landscape. Setiap peraturan yang dibuat kerajaan mendapat pengesahan dari pihak Belanda.

Pada masa penjajahan Belanda tersebut, bermunculan tokoh-tokoh Islam yang anti dengan Belanda. Beberapa diantaranya yang cukup fenomenal dan dikenang oleh masyarakat Riau dan nasional adalah Tuanku Tambusai, Sultan Zainal Abidinayah, Tuanku Syekh Abdul Wahab Rokan dan sebagainya. Perjuangan para tokoh tersebut dibuktikan dengan adanya peninggalan sejarah seperti Benteng Tujuh Lapis yang merupakan benteng yang dibuat masyarakat Dalu-dalu atas perintah dari Tuanku Tambusai. Beberapa bukti sejarah lainnya adalah Kubu jua, Kubu manggis, Kubu joriang dan sebagainya.

Sejarah Kabupaten Rokan Hulu Zaman Penjajahan Jepang
Setelah Belanda mengalami kekalahan dengan Jepang, Jepang pun berkuasa di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia termasuk di daerah Rokan Hulu. Pada masa Jepang, pemerintahan berjalan sebagaimana biasanya. Akan tetapi setelah beberapa orang raja ditangkap oleh penjajah Jepang, maka pemerintahan dilanjutkan oleh seorang ‘kuncho’ yang diangkat langsung oleh pihak Jepang.

Sejarah Kabupaten Rokan Hulu Zaman Pasca Kemerdekaan RI Setelah kemerdekaan, daerah-daerah yang dijadikan landscape oleh Belanda dan Jepang tersebut dijadikan sebagai satu daerah Kecamatan. Sebelum menguatnya isu pemekaran daerah di Indonesia pada tahun 1999, Rokan Hulu tergabung dalam Kabupaten Kampar, Riau. Kabupaten Rokan Hulu resmi didirikan pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan UU Nomor 53 tahun 1999 dan UU No 11 tahun 2003.

Kabupaten Rokan Hulu diberi julukan sebagai Negeri Seribu Suluk. Kabupaten yang mempunyai bukti sejarah perjuangan berupa Benteng Tujuh Lapis yang melahirkan seorang Pahlawan Nasional Tuanku Tambusai ini, telah dipimpin oleh 3 orang putra terbaik daerah ini, yaitu : H. Nurhasyim, SH (Plt tahun 1999), Drs.H.Achmad (Plt tahun 2000), H.Ramlan Zas, SH.MH dan Drs.H.Auni M Noor tahun 2001 – 2006 dan Drs. H. Achmad, M.Si. (Bupati Devenitif) dan H. Sukiman (Wakil Bupati Devenitif) tahun 2006 - 2011 yang merupakan pilihan rakyat dan Drs. H. Achmad, M.Si. dan Ir. H. Hafizh Syukri, MM tahun 2011-2016 yang merupakan Bupati Pilihan Rakyat untuk periode ke-2.²⁵ H.Sukiman (Plt tahun 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perjalannya sebagai sebuah kabupaten, maka daerah yang mempunyai iklim tropis dengan temperatur 22-31 derajat celcius dan dengan ketinggian 70-86 M dari permukaan laut ini, mempunyai pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir rata-rata 6,46% pertahun, dengan mata pencaharian penduduk bergerak pada bidang pertanian 52, 42%, bidang Industri 11,49 %, bidang perdagangan 7,14% dan sektor lain sebesar 28,95%.

B. Letak Geografis Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Riau dengan ibu kotanya terletak di Pasir Pangaraian. Berdasarkan Permendagri No.66 Tahun 2011, Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas wilayah sebesar 7.588,13 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 513.500 jiwa. Secara administratif, kabupaten ini memiliki 16 daerah kecamatan, 7 daerah kelurahan dan 149 daerah desa. Kabupaten Rokan Hulu dikenal dengan sebutan "Negeri Seribu Suluk".

Letak Geografis Kabupaten Rokan Hulu adalah 00 25' 20 derajat LU - 010 25' 41 derajat LU dan 1000 02' 56 derajat - 1000 56' 59 derajat . Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah yang terdiri dari 85% daratan dan 15% daerah perairan dan rawa. Secara geografis daerah ini berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Padang Lawas Utara dan kabupaten Labuhanbatu
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibukota Kabupaten Rokan Hulu adalah Pasir Pengarayan yang berjarak sekitar 180 KM dari Ibukota Provinsi, Pekanbaru. Selain Pasir Pengarayan, kota utama di Rohul adalah ujung batu. Di kabupaten Rokan Hulu terdapat beberapa sungai, 2 diantaranya adalah sungai yang cukup besar yaitu Sungai Rokan Kanan dan Sungai Rokan Kiri. Selain sungai besar tersebut, terdapat juga sungai-sungai kecil antara lain Sungai Tapung, Sungai Dantau, Sungai Ngaso, Sungai Batang Lubuh, Sungai Batang Sosa, Sungai Batang Kumu, Sungai Duo (Langkut), dan lain-lain.²⁶

Kabupaten Rokan Hulu berada pada ketinggian 70-86 Meter dari permukaan laut. Disebelah Barat Kabupaten mempunyai kontur tanah yang bergelombang yang merupakan bagian pegunungan Bukit Barisan (15 %) sedangkan sebagian besar lainnya (85 %) merupakan daerah rendah yang subur

Kabupaten Rokan Hulu tergolong daerah beriklim tropis dengan temperatur udara berkisar antara 22⁰ - 31⁰ C, terdapat dua musim yaitu Musim Hujan dan Musim Kemarau. Musim kemarau pada umumnya terjadi antara bulan Maret sampai dengan Agustus sedangkan Musim Hujan terjadi bulan September sampai dengan Januari.

Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 kecamatan, yaitu sebagai berikut:

1. Kecamatan Bangun Purba
2. Kecamatan Kabun
3. Kecamatan Kepenuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kecamatan Kunto Darussalam
5. Kecamatan Rambah
6. Kecamatan Rambah Hilir
7. Kecamatan Rambah Samo
8. Kecamatan Rokan IV Koto
9. Kecamatan Tambusai
10. Kecamatan Tambusai Utara
11. Kecamatan Tandun
12. Kecamatan Ujung batu
13. Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
14. Kecamatan Bonai Darussalam
15. Kecamatan Kepenuhan Hulu
16. Kecamatan Pendalian IV Koto

C. Letak Geografis Kecamatan Rokan IV Koto

Kecamatan Rokan IV Koto merupakan salah satu Kecamatan dari 16 Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu yang terletak di wilayah Selatan Kabupaten Rokan Hulu. Luas wilayah Kecamatan Rokan IV Koto adalah $\pm 1.30,45 \text{ km}^2$ yang membawahi 13 Desa 1 Kelurahan. Berdasarkan pembentukannya batas Kecamatan Rokan IV Koto adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pendalian
3. Sebelah Barat Berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kabun

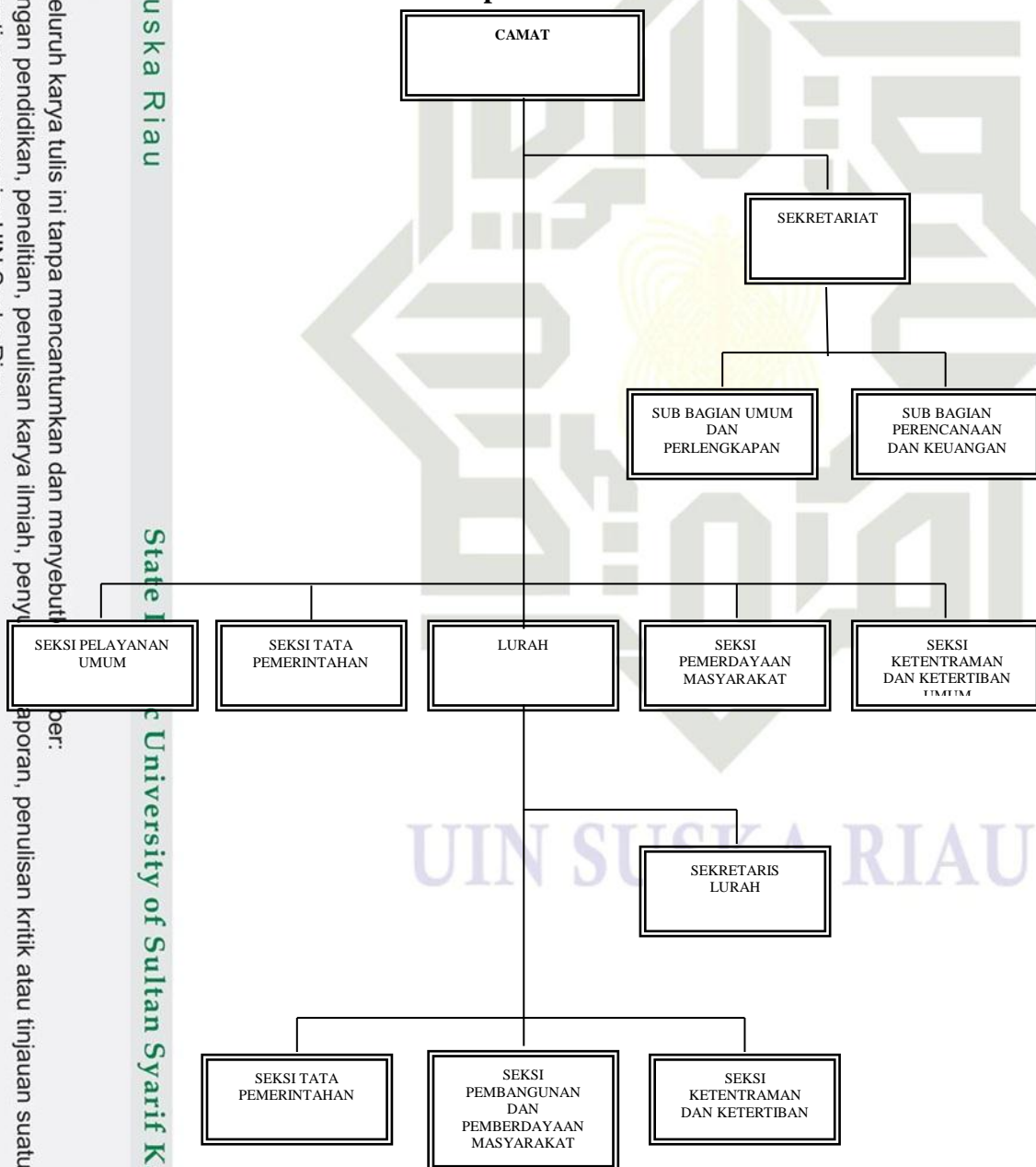
Kepadatan penduduk di Kecamatan Rokan IV Koto 24 Jiwa/Km².

Jumlah penduduk Kecamatan Rokan IV Koto sampai dengan Tahun 2013

Bulan Februari sebanyak 23.774 Jiwa dan 5.756 KK.

Struktur Organisasi Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Rokan IV Koto
Kabupaten Rokan Hulu



E. Visi Dan Misi Kecamatan Rokan IV Koto

1. Visi Rokan IV Koto

Mewujudkan aparatur kantor camat Rokan IV Koto yang profesionald dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menunjang visi dan misi Rokan Hulu 2017 – 2021.

2. Misi Rokan IV Koto

- Meningkatkan kinerja dan sumber daya aparatur kecamatan
- Aparatur yang bersih dan bebas KKN
- Meningkatkan IMTAQ dan IPTEK aparatur dan masyarakat
- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Camata Rokan IV Koto
- Peningkatan pengelolaan asset dan PAD

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Teori Dampak

Pengertian dampak menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat positif maupun negative.²⁷ Dampak dalam Bahasa Inggris disebut *impact* yang bersinonim dengan *effect* (akibat) atau *consequences* (akibat). Dampak merupakan suatu akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi baik itu negative maupun positif dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang melakukan suatu kegiatan tertentu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Jadi, ketika berbicara dampak pembangunan kita berbicara akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pembangunan. Dampak tersebut terdiri dari :²⁸

1. Dampak positif. Dampak yang dianggap baik oleh penyelenggara pembangunan maupun oleh orang lain.
2. Dampak negatif. Dampak yang dianggap tidak baik oleh penyelenggara pembangunan maupun oleh orang lain.
3. Dampak yang disadari (*intended consequences*). Dampak yang direncanakan oleh penyelenggara pembangunan. Dampak ini adalah dampak yang diketahui dan disadari akan terjadi. Dampak seperti ini

²⁷ Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, h. 243.

²⁸ Afrizal, *Menganalisis Dampak Sosial Pembangunan*, Makalah, Universitas Andalas, 2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biasanya mudah diketahui karena disadari keberadaanya atau sering telah ditulis oleh penyelenggara pembangunan dalam proposal pembangunannya.

4. Dampak yang tidak disadari (*unintended consequences*). Dampak yang tidak direncanakan oleh penyelenggara pembangunan. Dampak seperti ini biasanya sulit diketahui karena tidak disadari atau tidak pernah dapat ditemukan dalam proposal pembangunan oleh penyelenggara pembangunan. Dampak yang tidak disadari sering tergolong dampak negatif.

B. Pengertian Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.²⁹

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Ini berarti bahwa pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa.

²⁹ Bachrawi sanusi, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, cetakan Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain.³⁰ Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Untuk lebih jelasnya berikut ini disajikan pengertian pembangunan menurut beberapa ahli.

Siagian memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.³¹

Alexander mendefinisikan pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Portes mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Sama halnya dengan Portes, menurut Deddy T. Tikson bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi

³⁰ Diglib.unila.a.ac.id/982/8/BAB%20II.pdf

³¹ <https://amalmey.files.wordpress.com/2011/10/pengertian-pembangunan.do>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan

Ginanjar kartasasmita mendefenisikan pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui apa yang di lakukan secara terencana.³²

Sedangkan dalam pengertian ekonomi murni, pembangunan adalah suatu usaha proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro. Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi.

Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, *pembangunan* adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana.³³

Pembangunan yang di lakukan Negara Indonesia membutuhkan lahan tanah. Penggunaan lahan tanah maupun sumber kekayaan alam lainnya di atur dalam pasal 33 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan : “Bumi, Air, Dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”³⁴

³² <http://artikelsiana.id/2017/08/pengertian-pembangunan-tujuan-menurut-para-ahli-ciri-ciri.html>

³³ <https://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan/>

³⁴ Ronald Z. Titahelu, *Penetapan Asas- Asas Hukum Umum Dalam Penggunaan Tanah Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016) h. 1

C. Pengertian Bendungan

Bendungan adalah sebuah struktur yang dibangun di suatu daerah untuk menahan laju sejumlah air menjadi suatu danau, waduk, ataupun tempat rekreasi. Bendungan memiliki sebuah pintu yang disebut pintu air yang berfungsi untuk mengalirkan air yang diperlukan untuk kebutuhan ataupun kelebihan air yang tidak diperlukan dengan cara dikeluarkan secara bertahap. Salah satu fungsi dari bendungan yaitu untuk mengalirkan air untuk menggerakkan turbin PLTA (Pembangkit Listrik tenaga Air), untuk menstabilkan aliran air/irigasi, mencegah banjir.

D. Pengertian Waduk

Pengertian Waduk adalah kolam besar tempat menyimpan air tersedia untuk berbagai kebutuhan. Waduk dapat terjadi secara alami maupun dibuat manusia. Waduk buatan dibangun dengan cara membuat bendungan yang lalu dialiri air sampai waduk tersebut penuh. Fungsi waduk secara prinsip ialah menampung air saat debit tinggi untuk digunakan saat debit rendah. Seperti konstruksi sipil lainnya, persoalan waduk menyangkut aspek perencanaan operasi, pemeliharaan.³⁵

Waduk menurut pengertian umum adalah tempat pada permukaan tanah yang digunakan untuk menampung air saat terjadi kelebihan air / musim penghujan sehingga air itu dapat dimanfaatkan pada musim kemarau.³⁶

³⁵ <https://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-waduk.html>

³⁶ <https://theodoruspasomb.blogspot.com/2014/10/pengertian-waduk-jenis-jenis-waduk.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber air waduk terutama berasal dari aliran permukaan ditambah dengan air hujan langsung.

Telaga/danau/situ/waduk/embung adalah salah satu sumber air tawar yang menunjang kehidupan semua makhluk hidup dan kegiatan sosial ekonomi manusia. Ketersediaan sumberdaya air, sangat mendasar untuk menunjang pengembangan ekonomi wilayah. Sumber daya air yang terbatas disuatu wilayah mempunyai implikasi kepada kegiatan pembangunan yang terbatas dan pada akhirnya kegiatan ekonomipun terbatas sehingga kemakmuran rakyat makin lama tercapai. Air danau/waduk dapat digunakan untuk berbagai pemanfaatan antara lain sumber baku air minum air irigasi, pembangkit listrik, penggelontoran, perikanan dsb. Ekosistem danau memiliki peran penting dalam menjamin kualitas dan kuantitas ketersediaan air tawar. Danau juga sangat peka terhadap perubahan parameter iklim. Variasi suhu dan curah hujan misalnya, dapat langsung berpengaruh pada penguapan air, tinggi permukaan dari volume air, keseimbangan air dan produktivitas biologis perairan danau.³⁷

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Pasal 1 ayat 1 Tahun 2010 tentang Bendungan, bahwa bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (*tailing*), atau menampung lumpur sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbentuk waduk. Bendungan atau waduk merupakan wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.³⁸

Sedangkan Pengertian waduk atau bendungan menurut beberapa para ahli :

1. Kartasapoetra

Bendungan adalah bangunan air yang di bangun secara melintang sungai, sedemikian rupa agar permukaan air sungai di sekitarnya naik sampai ketinggian tertentu, sehingga air sungai tadi dapat dialirkan melalui pintu sadap ke saluran-saluran pembagi kemudian hingga kelahan pertanian.

2. Sani

Bendungan adalah bangunan yang berfungsi sebagai peninggi pemuka air dan penyimpanan di musim hujan waktu air sungai mengalir dalam jumlah besar yang melebihi kebutuhan baik untuk keperluan irigasi, air minum industry atau yang lainnya.³⁹

E. Jenis-Jenis Dan Manfaat Waduk

Waduk atau bendungan mempunyai bermacam – macam jenis dan berbagai manfaat. Beberapa macam jenis bendungan diantaranya adalah :⁴⁰

1. Tipe bendungan berdasarkan tujuan pembangunannya :

- a. Bendungan dengan tujuan tunggal (*single purpose dam*) adalah bendungan yang dibangun untuk memenuhi satu tujuan saja, misalnya

³⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 37 Pasal 1 Tahun 2010 tentang Bendungan

³⁹ [https:// www. Pelajaran. Id/2019/08/pengertian-bendungan-di-indonesia.html](https://www.Pelajaran.Id/2019/08/pengertian-bendungan-di-indonesia.html)

⁴⁰ [https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/8412/Bab%202.p](https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/8412/Bab%202.pdf?sequence=9)
df?sequence=9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk pembangkit tenaga listrik, irigasi, pengendali banjir, atau tujuan lainnya tetapi hanya untuk satu tujuan saja

- b. Bendungan serbaguna (*multipurpose dam*) adalah bendungan yang dibangun untuk memenuhi beberapa tujuan, misalnya : pembangkit tenaga listrik (PLTA) dan irigasi, pengendali banjir dan PLTA, air minum dan irigasi, air baku, PLTA dan irigasi dan lain sebagainya.
2. Tipe bendungan berdasarkan penggunaannya :
- a. Bendungan penampung air (*storage dam*) adalah bendungan yang digunakan untuk menyimpan air pada masa surplus dan dipergunakan pada masa kekurangan, termasuk dalam bendungan penampung adalah tujuan rekreasi, perikanan, pengendali banjir dan lain – lain.
 - b. Bendungan pembelok (*diversion dam*) adalah bendungan yang digunakan untuk meninggikan muka air, biasanya untuk keperluan mengalirkan air ke dalam sistem aliran menuju ke tempat yang memerlukan.
 - c. Bendungan penahan (*detention dam*) adalah bendungan yang digunakan untuk memperlambat dan mengusahakan seminimal mungkin efek aliran banjir yang mendadak. Air ditampung secara berkala / sementara, dialirkan melalui pelepasan (outlet).
3. Tipe bendungan berdasarkan jalannya air
- a. Bendungan untuk dilewati air (*overflow dam*) adalah bendungan yang dibangun untuk dilimpasi air pada bangunan pelimpah (spillway).
 - b. Bendungan untuk menahan air (*none overflow dam*) adalah bendungan yang sama sekali tidak boleh dilimpasi air.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. © Tipe bendungan berdasarkan material pembentuknya :

- a. Bendungan urugan (*rock fill dam, embankment dam*) adalah bendungan yang dibangun dari hasil penggalian bahan (material) tanpa tambahan bahan lain yang bersifat campuran secara kimiawi, jadi betul – betul bahan pembentuk bangunan asli.
- b. Bendungan beton (*concrete dam*) adalah bendungan yang dibuat dari konstruksi beton baik dengan tulangan maupun tidak. Kemiringan permukaan hulu dan hilir tidak sama pada umumnya bagian hilir lebih landai dan bagian hulu mendekati vertikal dan bentuknya ramping.

Beberapa manfaat yang mampu diberikan sebuah bendungan

diantaranya adalah :

1. Irigasi

Pada saat musim hujan, air hujan yang turun di daerah tangkapan air sebagian besar akan mengalir ke sungai-sungai, air itu dapat ditampung sehingga pada musim kemarau air yang tertampung tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain untuk irigasi lahan pertanian.

2. Penyediaan Air Baku

Waduk selain sebagai sumber untuk pengairan persawahan juga dimanfaatkan sebagai bahan baku air minum dimana diperkotaan sangat langka dengan air bersih.

3. Sebagai PLTA

Dalam menjalankan fungsinya sebagai PLTA, waduk dikelola untuk mendapatkan kapasitas listrik yang dibutuhkan. Pembangkit listrik

tenaga air (PLTA) adalah suatu sistem pembangkit listrik yang biasanya terintegrasi dalam bendungan dengan memanfaatkan energi mekanis aliran air untuk memutar turbin, diubah menjadi energi listrik melalui generator.

4. Pengendali Banjir

Sungai dengan debit air yang besar jika tidak dikendalikan dengan cermat maka akan membahayakan masyarakat sekitar sungai itu sendiri, maka permasalahan itu dapat dijadikan sebagai latarbelakang dari pendirian waduk. Pada saat musim hujan, air hujan yang turun di daerah tangkapan air sebagian besar akan mengalir ke sungai-sungai yang pada akhirnya akan mengalir ke hilir sungai yang tidak jarang mengakibatkan banjir di kawasan hilir dari sungai tersebut, apabila kapasitas tampung bagian hilir sungai tidak memadai. Dengan dibangunnya bendungan-bendungan di bagian hulu sungai maka kemungkinan terjadinya banjir pada musim hujan dapat dikurangi dan pada musim kemarau air yang tertampung tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain untuk pembangkit listrik tenaga air, untuk irigasi lahan pertanian, untuk perikanan, untuk pariwisata dan lain sebagainya.

5. Perikanan

Untuk mengganti mata pencaharian para penduduk desa yang desanya ditenggelamkan untuk pembuatan waduk yang dulu bermata pencaharian sebagai petani sekarang beralih ke dunia perikanan dengan memanfaatkan waduk ini para penduduk dapat membuat rumah apung yang digunakan untuk peternakan ikan air tawar jadi ikan - ikan itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
dipelihara di dalam jaring apung ataupun dalam karamba – karamba.

6. Pariwisata dan Olahraga Air

Dengan pemandangan yang indah waduk juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi dan selain tempat rekreasi juga dimanfaatkan sebagai tempat olahraga air maupun sebagai tempat latihan para atlet olahraga air.⁴¹

F. Dasar-Dasar Pengaturan Waduk

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air
3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2010 tentang bendungan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2011 tentang bendungan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang sungai
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2012 tentang pengelolaan daerah aliran sungai
9. Peraturan Pemerintah Nomor 121 tahun 2015 tentang pengusaha sumber daya air
10. Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum

⁴¹
bendungan.html

<https://www.kajianpustaka.com/2018/12/pengertian-fungsi-manfaat-dan-jenis->

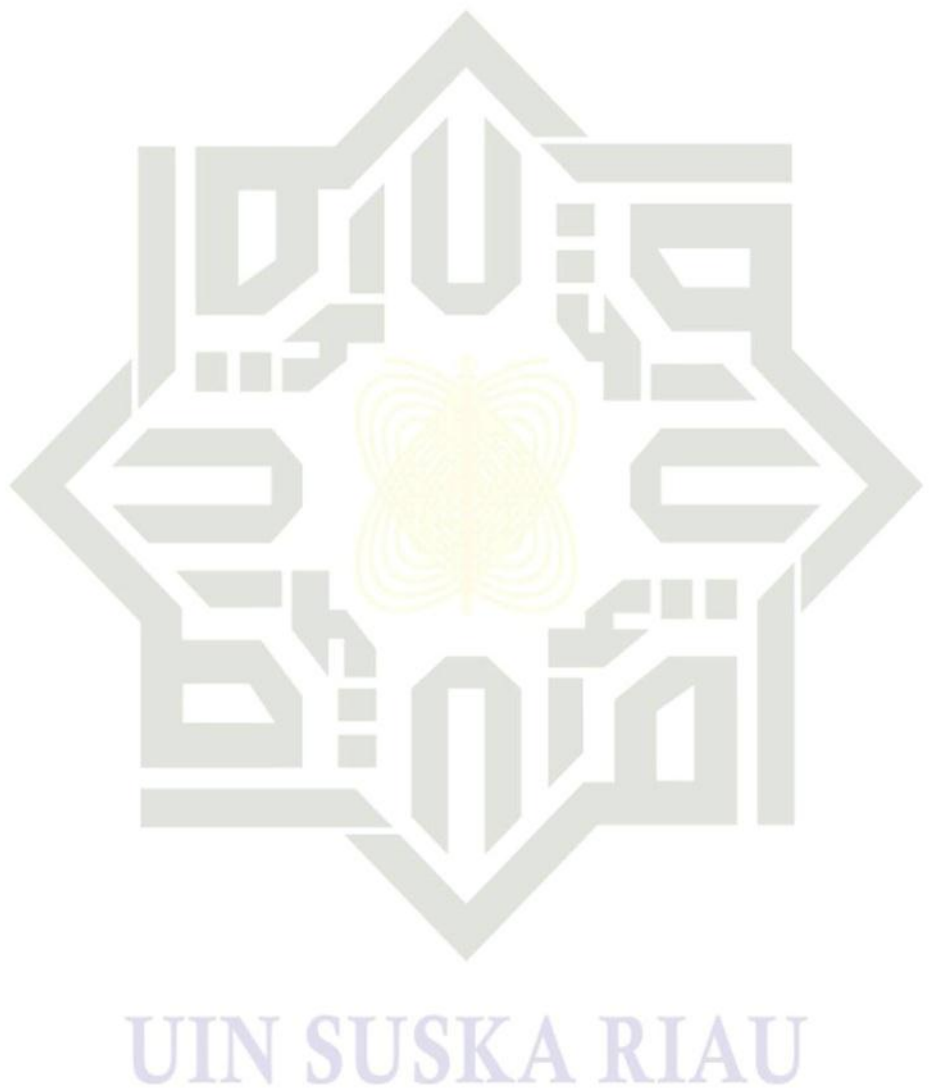
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



11. Peraturan Presiden nomor 148 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peratutan presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum
12. Peraturan menteri PUPR No 27 tahun 2015 tentang pengalihan air sungai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Dampak Pembangunan Waduk Serbaguna Di Rokan Kiri Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Tahapan dalam pembangunan waduk serbaguna di rokan kiri kabupaten rokan hulu mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil dan proses penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak sesuai dengan praturan presiden nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
2. a. Dampak positif pembangunan waduk rokan kiri di kabupaten rokan hulu Menghasilkan air baku ($0,12 \text{ m}^3/\text{detik}$), Irigasi (potensi: 6000 Ha), PLTA, Pariwisata.
- b. Dampak Negatif Pembangunan Waduk Serbaguna Di Rokan Kiri Kabupaten Rokan Hulu yaitu Penggusuran rumah warga, Hilangnya sumber penghidupan masyarakat cipang, Menghilangkan potensi alam diantaranya Goa Kelambu Kuning, Puncak Vila Berkurung Embun, Tidak mendapatkan ganti rugi, Banjir, Pembangunan waduk terhenti, Terancamnya biaya pendidikan, Pembangunan waduk menurut presiden:

B. Saran

ptu Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dalam pembangunan waduk serba guna di rokan kiri kabupaten rokan hulu seharusnya melalui prosedur Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 2. Pembangunan waduk serba guna di rokan kiri kabupaten rokan hulu lebih berdampak kenegatif maka pembangunan waduk tersebut harus di batalkan dan dicabut dari nawacita bapak jokowi selaku presiden republik Indonesia yang telah mengeluarkan peraturan presiden nomor 56 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas praturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nsional.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Abdurrahman, *Masalah Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, cet. ke-2, Bandung: Alumni, 1983
- Amiruddin, Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007
- Arie Sukanti Hutagalung, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Jakarta: Rajawali, 2008
- Bachrawi sanusi, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, cetakan Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2003
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Ronald Z. Titahelu, *Penetapan Asas- Asas Hukum Umum Dalam Penggunaan Tanah Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat*, Yogyakarta: Deepublish, 2016
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1983
- Wianahyu Erwiningsih, "Hak Menguasai Negara atas Tanah", *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Program Pascasarjana, 2009
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden nomor 56 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- uharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya
- frizal, *Menganalisis Dampak Sosial Pembangunan*, Makalah, Universitas Andalas, 2008.
- <http://www.bbc.com> .Ribuan Warga Tolak Pembangunan Waduk Rokan Kiri Riau, Diakses Tanggal 06 Agustus 2018
- <http://dprd-rohul.go.id/pages/sejarah-kabupaten-rokan-hulu>
- <http://erwinmakalah.blogspot.com/2017/10/tentang-rokan-hulu-lengkap.html>
- <https://www.riau.go.id/home/content/22/kab-rokan-hulu>
- <http://erwinmakalah.blogspot.com/2017/10/tentang-rokan-hulu-lengkap.html>
- [Diglib.unila.a.ac.id/982/8/BAB%20II.pdf](http://diglib.unila.a.ac.id/982/8/BAB%20II.pdf)
- <https://amalmey.files.wordpress.com/2011/10/pengertian-pembangunan.do>
- <http://artikelsiana.id/2017/08/pengertian-pembangunan-tujuan-menurut-para-ahli-ciri-ciri.html>
- <https://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan/>
- <https://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-waduk.html>
- <https://theodoruspasomb.blogspot.com/2014/10/pengertian-waduk-jenis-jenis-waduk.html>
- <https://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-waduk.html>
- <https://www.Pelajaran.Id/2019/08/pengertian-bendungan-di-indonesia.html>
- <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/8412/Bab%202.pdf?sequence=9>
- <https://www.kajianpustaka.com/2018/12/pengertian-fungsi-manfaat-dan-jenis-bendungan.html>
- Afrizal, *Menganalisis Dampak Sosial Pembangunan*, Makalah, Universitas Andalas, 2008.
- Abu Bakar, Masyarakat Desa Cipang Kanan , *Wawancara*, 27 Maret 2019
- Amran, Kepala desa cipang kiri hulu, *Wawancara* 27 Maret 2019
- Anrio, Tokoh Adat Cipang Kiri, *Wawancara*, 27 Maret 2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Erlis, Kepala desa cipang kiri hulu, *Wawancara* 27 Maret 2019.
 Asman, Masyarakat Desa Cipang Kiri Hulu , *Wawancara*, 27 Maret 2019
 Aswin, Masyarakat Desa Cipang Kiri Hulu , *Wawancara*, 26 Maret 2019
 Izzwir Abbas, Kepala Desa Cipang Kiri Hilir, *Wawancara*, Cipang Kiri Hilir, 27 Maret 2019
 Parsi, Masyarakat Desa Cipang Kanan, *Wawancara*, 26 Maret 2019
 Damri, Masyarakat Desa Cipang Kanan , *Wawancara*, 27 Maret 2019
 Gonto, Masyarakat Desa Cipang Kiri Hulu, *Wawancara*, 26 Maret 2019
 Hadi, Tokoh adat cipang kanan, *Wawancara* 27 Maret 2019
 Hamdi , tokoh adat cipang kiri hulu, , *Wawancara*, 27 Maret 2019
 Jaka, Masyarakat Desa Tibawan , *Wawancara*, 26 Maret 2019
 Keli, Masyarakat Desa Tibawan , *Wawancara*, 26 Maret 2019
 Muhammar Faisal,ST, an. Kepala Bidang Pengairan Kepala Seksi Perencanaan Teknis Dan Pengawasan, *Wawancara*, 02 April 2019
 Parlan, Masyarakat Desa Tibawan , *Wawancara*, 26 Maret 2019
 Putra, Masyarakat Desa Cipang Kiri Hilir , *Wawancara*, 26 Maret 2019
 Radin, Kepala Desa Tibawan , *Wawancara*, 26 Maret 2019
 Sannelya, Seketaris desa cipang kanan, *Wawancara* 27 Maret 2019
 Sigit Pranjoro S.Stp, Seketaris rokan IV koto, *Wawancara* 02 April 2019
 Yuli. Bidang Pengairan Kepala Seksi Perencanaan Teknis Dan Pengawasan, *Wawancara*, 12 Agustus 2019
 Zulman, Masyarakat Desa Cipang Kiri Hilir, *Wawancara*, 27 Maret 2019
 Zufrianto, Tokoh Adat Tibawan, *Wawancara*, 26 Maret 2019.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara tokoh adat tibawan



wawancara kepala desa tibawan



Wawancara tokoh adat cipang kanan



Wawancara sekdes cipang kanan



Tokoh adat cipang kiri hulu



wawancara kepala desa cipang kiri hulu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara kepala desa cipang kiri hilir



wawancara sekretaris kecamatan



Wawancara BWSS III



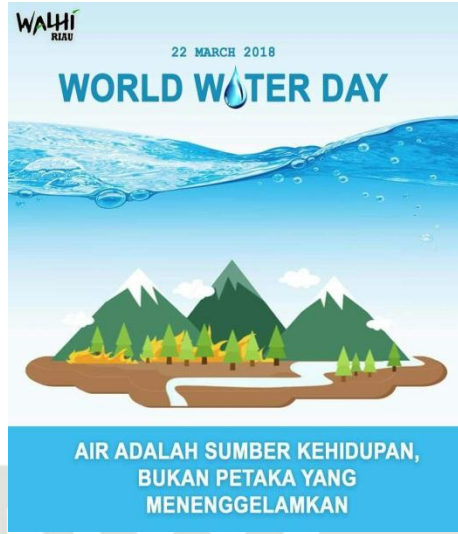
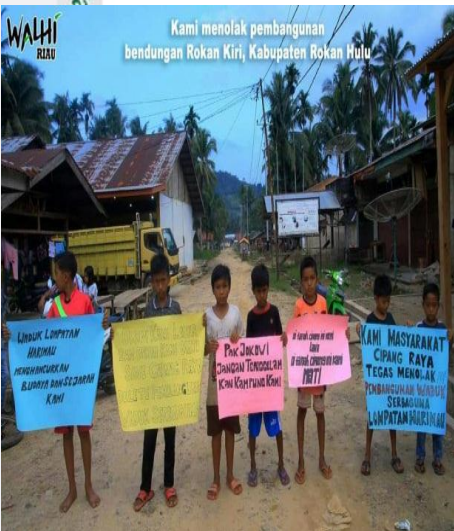
Wawancara PUPR ROHUL



Wawancara tokoh adat cipang kiri hilir



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Riau



Islam

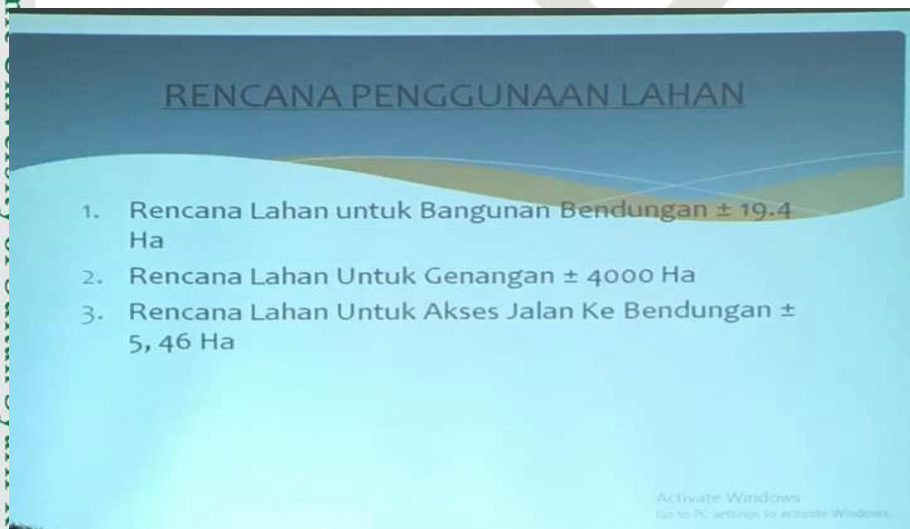
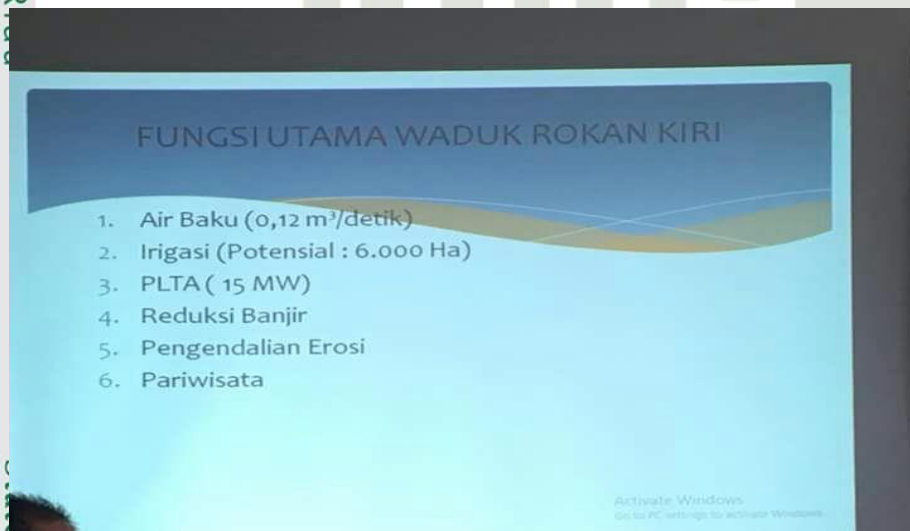


Kasim Riau



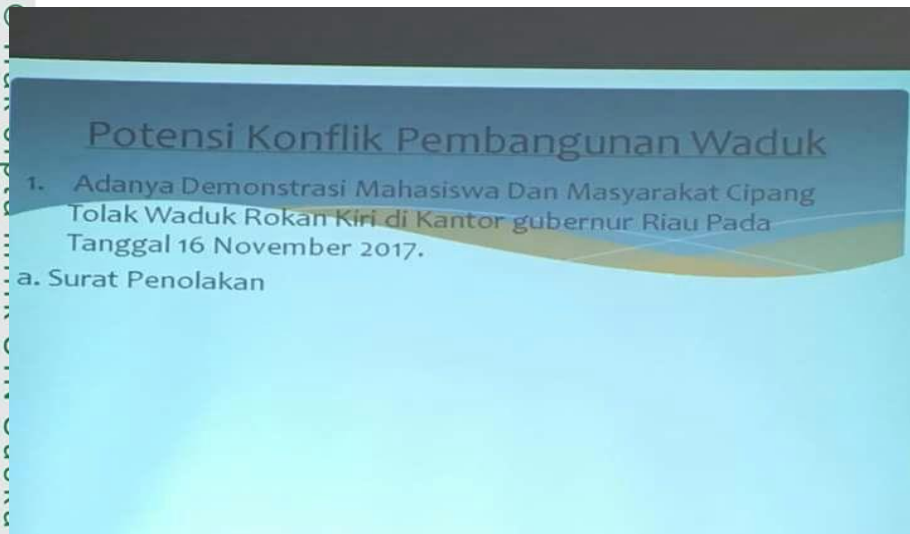
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul, "Dampak Pembangunan Waduk Serbaguna Di Rokan Kiri Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum" yang ditulis oleh :

Nama : SYAHRON LUBIS
NIM : 11427100719
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 28 Oktober 2019
Waktu : Jam, 13.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasayah Fakultas Syariah dan hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Oktober 2019
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, MA.


Sekretaris
Ahmad Fauzi, SH., MA.

Penguji 1
Lysa Angrayni, SH., MH.

Penguji 2
H. Mhd. Kastulani, SH., MH.



Mengetahui,
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum


Erni, S.Sos., MM
NIP. 19680226 199103 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2013/2019
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 08 Maret 2019

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SYAHRON LUBIS
NIM : 11427100719
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : X (Sepuluh)
Lokasi : 1. Kepala Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Rokan Hulu
2. Badan Wilayah Sungai Sumatera III
3. Kantor Camat IV Koto
4. Kepala Desa 5. Tokoh Adat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
: DAMPAK PEMBANGUNAN WADUK SERBAGUNA DI ROKAN KIRI KABUPATEN
ROKAN HULU BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIR 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU

Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/19708
TENTANG



182010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2013/2019 Tanggal 8 Maret 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : SYAHRON LUBIS |
| 2. NIM / KTP | : 11427100719 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : DAMPAK PEMBANGUNAN WADUK SERBA GUNA DI ROKAN KIRI KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN PERATURAN PERSIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELANGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK UMUM |
| 7. Lokasi Penelitian | : 1. KEPALA DINAS PEKERJA UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ROKAN HULU
2. BADAN WILAYAH SUNGAI SUMATERA III
3. KANTOR CAMAT ROKAN IV KOTO
4. KEPALA DESA
5. TOKO ADAT |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 8 Maret 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu
Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Paspengaraian
3. Balai Wilayah Sungai Sumatera III Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos : 28557 Email : dpmptsp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id>

REKOMENDASI

NOMOR:503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/099

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, setelah membaca Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/19708 pada tanggal 8 Maret 2019 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Riset/ Pra Riset dan pengumpulan Data untuk bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : SYAHRON LUBIS
N I M : 11427100719
Jurusan : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1 (Strata 1)
Judul Penelitian : "Dampak Pembangunan Waduk Serba Guna Di Rokan Kiri Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum "
Lokasi Penelitian : 1.Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Rokan Hulu
2.Badan Wilayah Sungai Sumatera III
3. Kantor Camat Rokan IV Koto
4.Kepala Desa
5.Tokoh Adat

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak Melakukan Kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini, Terima Kasih.

Dibuat di : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : 18 Maret 2019



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,

RIDARMANTO S,IP
Pembina Utama Muda
NIP.19721006 199201 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

f Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN ROKAN IV KOTO
DESA CIPANG KANAN**

Alamat : Kubang Buaya

Kode Pos : 28555

SURAT KETERANGAN
Nomor : 141/PEM/2019/65

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini Kepala Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama : SYAHRON LUBIS
Jenis Kelamin : laki- laki
NIM : 11427100719
Jurusan : Ilmu Hukum
Jenjang : SI
Tempat penelitian : Cipang Kanan
Desa : Cipang Kanan
Kecamatan : Rokan IV koto

Sesuai Dengan Surat Rekomendasi Dari Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu NO.503/DPMPSTP/ NON IZIN-RISET/099 Dengan Telah Merekomendasi Nama Yang Tertera Di Atas Untuk Melakukan Penelitian Tentang "DAMPAK PEMBANGUNAN WADUK SERBA GUNA DI ROKAN KIRI KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM" Dalam Hal Ini Telah Selesai Melaksanakan Penelitian Di Maksud.

Demikian Surat Keterangan Ini Di Buat Untuk Dapat Di Gunakan Sebagaimana Mestinya.

Cipang Kanan, 27 maret 2019

AN, Kepala Desa Cipang Kanan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN ROKAN IV KOTO
DESA CIPANG KIRI HULU**

JLN. PARALAYANG SEI KIJANG

KODE POS 28331

SURAT KETERANGAN

Nomor: 140/PEMDes-CKH/2019/83

Yang bertanda tangan dibawah ini Desa Cipang Kiri Hulu Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: SYAHRON LUBIS
Tempat/Tgl Lahir	: SUKA MAJU, 01 Januari 1995
N I M	: 11427100719
Program Studi	: ILMU HUKUM
Jenjang	: STRATA I

Sesuai surat Rekomendasi kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu No:503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/099 dengan telah merekomendasikan nama yang tertera diatas untuk melakukan penelitian tentang " Dampak pembangunan waduk serba guna di Rokan Kiri Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan peraturan presiden nomor 71 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum" dalam hal ini telah selesai melaksanakan penelitian dimaksud.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cipang Kiri Hulu 27 Maret 2019

Desa Cipang Kiri Hulu



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN ROKAN IV KOTO
DESA CIPANG KIRI HILIR

Alamat : Tandikat

Kode Pos : 28455

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/PEM/III/2019/75

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Cipang Kiri Hilir Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: SYAHRON LUBIS
Jenis Kelamin	: Laki -laki
NIM	: 11427100719
Jurusan	: S.1 Ilmu Hukum
Tempat Penelitian	: Desa Cipang Kiri Hilir
Desa	: Cipang Kiri Hilir
Kecamatan	: Rokan IV Koto

Sesuai dengan surat rekomendasi dari Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu No. 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/099 dengan telah merekomendasikan nama yang tertera di atas untuk melakukan penelitian tentang *Dampak Pembangunan Waduk serba guna di Rokan Kiri Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum* dalam hal ini telah selesai melaksanakan Penelitian dimaksud.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tandikat, 27 Maret 2019

KEPALA DESA CIPANG KIRI HILIR



AZWIR ABBAS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN ROKAN IV KOTO
DESA TIBAWAN**

Alamat : Jalan Lintas Riau-Sumbar

Kode Pos : 28555

SURAT KETERANGAN
Nomor : 013/PEMDes/III/2019

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini Kepala Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama : SYAHRON LUBIS
Jenis Kelamin : laki-laki
NIM : 11427100719
Jurusan : Ilmu Hukum
Jenjang : SI
Tempat penelitian : Desa Tibawan
Desa : tibawan
Kecamtan : Rokan IV koto

Sesuai dengan surat rekomendasi dari kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu NO.503/DPMP/TSP/ NON IZIN-RISET/099 dengan telah merekomendasi nama yang tertera di atas untuk melakukan penelitian tentang "DAMPAK PEMBANGUNAN WADUK SERBA GUNA DI ROKAN KIRI KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM" dalam hal ini telah selesai melaksanakan penelitian di maksud.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Tibawan, 26 maret 2019

Kepala desa tibawan



RADIUS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN ROKAN IV KOTO

JALAN SUTAN PANGLIMO DALAM KM.2 ROKAN-PANDALIAN
 TELP. (0762) 62979

KODE POS : 28455

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/PMD/2019/02

Yang bertanda tangan di bawah ini Camat Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: SYAHRON LUBIS
Jenis Kelamin	: laki- laki
NIM	: 11427100719
Jurusan	: Ilmu Hukum
Jenjang	: SI
Tempat penelitian	: Kecamatan Rokan IV Koto
Desa	: Cipang Kanan, Cipang Kiri Hulu, Cipang Kiri Hilir, Tibawan
Kecamatan	: Rokan IV Koto

Sesuai Dengan Surat Rekomendasi Dari Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu NO.503/DPMPSTP/ NON IZIN-RISET/099 Tentang pelaksanaan kegiatan Riset / Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan skripsi Pelaksanaan kegiatan Riset Dengan Telah Merekomendasi Nama Yang Tertera Di Atas Untuk Melakukan Penelitian dengan judul "DAMPAK PEMBANGUNAN WADUK SERBA GUNA DI ROKAN KIRI KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM" Dalam Hal Ini Telah Selesai Melaksanakan Penelitian Di Maksud.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Rokan, 02 April 2019
 An. CAMAT ROKAN IV KOTO


SIGIT PRANJORO, S.STP
 Pengeta III/ c
 NIP.19900420 201010 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Komplek Perkantoran Pemda Jalan Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian Telp/Fax. (0762) 91750
Kode Pos. 28557. Website. dispupr.rokanhulukab.go.id e-mail. http://mail.rokanhulukab.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 610/PUPR-AIR/SK/09

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: SYAHRON LUBIS
Jenis Kelamin	: Laki-laki
NIM	: 11427100719
Jurusan	: Ilmu Hukum
Jenjang	: S1
Tempat penelitian	: Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu
Kecamatan	: Rambah

Sesuai dengan Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/099 dengan telah memberikan Surat Keterangan atas nama yang tertera di atas untuk melakukan penelitian tentang "DAMPAK PEMBANGUNAN WADUK SERBA GUNA DI ROKAN KIRI KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM" dalam hal ini telah selesai melaksanakan penelitian dimaksud.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pasir Pengaraian, 02 April 2019

an. KEPALA BIDANG PENGAIRAN
KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS
DAN PENGAWASAN



MUHAMMAR FAISAL, ST
NTP. 19840229 200903 1 002



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Syahron Lubis , lahir di Desa Sukamaju Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu Provinsi Riau pada tanggal 01 Januari 1995 merupakan anak ketujuh dari tujuh bersaudara, lahir dari pasangan ayahanda Alm Udin Sulaiman dan Ibunda Almh Nuraini. Pada tahun 2002 memulai pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di SDN 017 Desa Sukamaju, Kecamatan Tambusai.Lulus pada tahun 2008. Setelah itu, di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan pada Sekolah Pondok Pesantren Hasanatul Barokah selama 6 (enam) tahun, Kemudian pada tahun 2014 berkat restu dan doa keluarga, penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 (S-1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, dengan jurusan Ilmu Hukum.

Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang selama 2 (dua bulan) di Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang. Selain itu penulis juga aktif dalam beberapa kegiatan organisasi baik internal maupun eksternal kampus sebagai pengasah dan mengolah bakat serta membentuk karakter kepemimpinan yang baik. Atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu WaTa'ala serta do'a dan dukungan dari orang - orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **"Dampak Pembangunan Waduk Serbaguna Di Rokan Kiri Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum"** di bawah bimbingan langsung Bapak Peri Pirmansyah SH.,MH. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 28 Oktober 2019, penulis dinyatakan **LULUS** dan telah berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (SH).

Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, Yakin Usaha Sampai.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.